

Pengaruh Pembangunan Industri Pertahanan Terhadap Pertahanan Negara

Dodiek Alfianzi

Sekolah Staf dan Komando TNI AL Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Email: dodiekalfianzi@gmail.com

Abstrak

Indonesia dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi meliputi 0,8 juta kilometer persegi laut teritorial, 2,3 juta kilometer persegi lautan, dan 2,7 juta kilometer persegi ZEE. Pertumbuhan ekonomi, termasuk perluasan sektor pertahanan, dimungkinkan berkat potensi sumber daya bangsa. Ada korelasi langsung antara perkembangan industri pertahanan dan peningkatan perekonomian secara umum. Optimalisasi keadaan menuntut perubahan sistem yang menghasilkan kebijakan, dan perumusan kebijakan memerlukan tiga fase manajemen-perencanaan (plan), tindakan (do/act), dan penilaian (evaluasi) hasil (evaluasi). Pendanaan di tingkat nasional digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Strategi implementasi industri pertahanan belum dapat maksimal karena belum optimalnya implementasi beberapa aspek, antara lain sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan. Makalah ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana kontraktor pertahanan memengaruhi strategi militer di tingkat nasional.

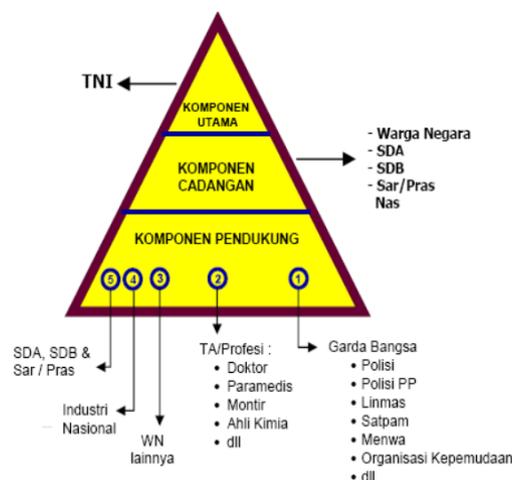
Kata Kunci: Pertahanan Negara, Industri pertahanan, Kebijakan Pertahanan Negara



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam Indonesia, diperkirakan bernilai Rp. 200.000 triliun, membuat negara makmur dan maju secara teknologi, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan yang signifikan. Melindungi negara yang kuat memerlukan strategi pertahanan negara yang matang yang merinci kebijakan pertahanan negara, rencana pengembangan postur pertahanan negara, membuat doktrin, dan rencana pertahanan militer dan non-militer. Sangat penting untuk memiliki dukungan tingkat sistem untuk melindungi strategi nasional. Melindungi negara, wilayah, dan warganya dari segala bahaya memerlukan pertahanan negara yang kokoh dan dapat diandalkan, terutama sistem pertahanan universal yang mencakup seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional.



Gambar 1. Komponen Pertahanan Negara

Seperti terlihat pada Gambar 1, TNI merupakan komponen utama pertahanan, sedangkan komponen cadangan terdiri dari sumber daya nasional yang telah siap dan dapat dikerahkan dalam keadaan darurat, dan komponen pendukung terdiri dari sumber daya nasional yang dapat menunjang kemampuan primer, dan komponen cadangan. Militer harus memiliki model manajemen rantai pasokan logistik yang memungkinkan pengadaan, pemeliharaan, dan distribusi yang optimal tanpa membahayakan kesiapan. Kekuatan kesiapan militer dan visibilitas global digabungkan dalam manajemen rantai pasokan militer, yang menggunakan praktik bisnis komersial.

Beberapa kendala harus diatasi sebelum industri pertahanan di negara kepulauan dapat dioptimalkan. Pertama, aspek regulasi pemerintah belum sepenuhnya mengembangkan visi yang menjadi poros dunia maritim dikarenakan ekonomi masih segmen berbasis darat. Karena hanya ada sedikit kemajuan dalam hal teknologi untuk mengekstraksi nilai dari sumber daya alam laut, cukup beralasan bahwa perkiraan potensi kekayaan alam laut Indonesia masih berupa perkiraan. Bagian dari angkatan kerja atau tenaga kerja secara keseluruhan yang belum sepenuhnya ahli dalam ilmu kelautan. Aparat keamanan untuk pemantauan laut belum bersatu sehingga menimbulkan masalah di masyarakat pesisir.

Ada beberapa wilayah abu-abu hukum di mana urusan udara, laut, serta darat tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kurangnya struktur di bagian-bagian lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan yang tampaknya tidak berfungsi secara mandiri. Industri pertahanan tertinggal karena sulitnya membangun negara-bangsa yang berdaulat. Untuk mengoptimalkan negara, perlu ditingkatkan sistem yang menghasilkan kebijakan; ini melibatkan proses multi-langkah yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendanaan untuk kebijakan tersebut berasal dari pemerintah (Yugiantoro, 2014). Penulis makalah ini berupaya membedah peran yang dimainkan industri dalam membentuk evolusi pertahanan dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan industri pertahanan negara, makalah ini menggunakan konsep-konsep strategis. Dalam studi kualitatif ini, kami mengeksplorasi fenomena problematika negara dalam pertumbuhan industri pertahanannya. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan yang cermat dan tinjauan studi sebelumnya yang relevan. Perlu optimalisasi pertumbuhan industri pertahanan melalui pembenahan masalah negara yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dan peran. Penelitian kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, dikombinasikan dengan teori-teori yang menguatkan, untuk memastikan tindakan terbaik untuk memanfaatkan potensi sumber daya suatu negara. Landasan teoretis mencakup konsep dan teori dari mana sintesis (kesimpulan) dapat diturunkan, serta indikator yang dikembangkan untuk digunakan pada tahap akhir penelitian.

1. Strategi

Sejumlah peneliti sudah mengusulkan definisi strategi ini. Tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta alokasi sumber daya prioritas yang membentuk strategi perusahaan semuanya penting bagi definisi strategi Chandler (1962) sebagai alat. Istilah strategi juga bisa dipahami sebagai reaksi yang kontinu atau berubah-ubah terhadap keuntungan dan kerugian organisasi, baik internal maupun eksternal. (Mintzberg 1991; Steiner dan Mintzberg 1977).

David (2011) berpendapat bahwa strategi adalah metode yang disepakati untuk mencapai tujuan menyeluruh organisasi. Pendekatan yang berbeda untuk melakukan bisnis termasuk pindah ke area baru, mengakuisisi perusahaan lain, menciptakan produk baru,

menembus pasar yang ada, memotong biaya, bergabung dengan pesaing, go public, go private, bangkrut, dan membentuk usaha patungan. Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan pilihan pada tingkat manajemen tertinggi dan investasi signifikan dari bisnis. Dengan demikian, strategi adalah setiap tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pembangunan

Terdapat dua aliran pemikiran utama dalam teori perkembangan ilmu sosial: modernisasi dan ketergantungan. Baik teori skala besar, tingkat makro pembangunan ekonomi dan pergeseran masyarakat dan teori nilai tingkat individu skala kecil merupakan bagian integral dari paradigma modernisasi. Klasifikasi Larrain memberikan landasan teoretis untuk paradigma ini, yang mengacu pada teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia (1994).

Meskipun Tikson (2005) mengkategorikan teori pembangunan menjadi tiga subbidang yang berbeda—modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan—istilah-istilah ini tidak saling eksklusif (Kumba, 2019). Banyak konsepsi kemajuan yang berbeda dari penggunaan berbagai paradigma ini. Dengan demikian, tujuan teori pembangunan adalah memberi peluang yang makin baik pada setiap orang dalam mengimplementasikan aspirasinya yang paling dalam serta paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Definisi pembangunan itu sendiri dapat berubah tergantung pada fokus penelitian seseorang. Mengubah perspektif seseorang adalah inti dari konsep pembangunan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami mengapa penelitian ini dilakukan, karena merupakan kekuatan pendorong di balik penciptaan pertahanan industri modern. Sehingga tidak terlepas dari tujuan yang lebih besar dari industrialisasi secara keseluruhan, kita dapat menyatakan hal ini:

- a. Mengimplementasikan Industri nasional diperuntukkan pilar serta penggerak perekonomian Nasional;
- b. Mengimplementasikan kedalaman serta kekuatan struktur Industri;
- c. Mengimplementasikan Industri mandiri, berdaya saing, serta maju, juga Industri Hijau;
- d. Mengimplementasikan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, juga pencegahan daripada pemusatan ataupun penguasaan Industri dari satu kelompok ataupun perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Meluaskan peluang berusaha serta perluasan peluang kerja;
- f. Mengimplementasikan pemerataan pembangunan Industri untuk keseluruhan wilayah Indonesia untuk memperkuat serta memperkuat ketahanan Nasional;
- g. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat dengan berkeadilan.

Mempertimbangkan faktor lingkungan memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. UU RI. 3 Tahun 2014, Pasal 3 Ayat 3 mengatur tentang penyelenggaraan usaha di Industri Hijau yang meliputi hal-hal tersebut di atas. Industri Hijau berdasarkan UU RI no. 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 ialah "Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat".

3. Seseorang bisa menjadi dokter, mahasiswa, orang tua, pemilik bisnis, dan sebagainya, menurut teori peran. Oleh karena itu, perilaku yang sesuai untuk peran itu diharapkan setiap saat. Pada dasarnya teori peran memfokuskan pada hakikat personal sebagai aktor sosial. Teori berikut ialah cara berpikir tentang bagaimana orang bertindak berdasarkan di mana

mereka berdiri di tempat kerja dan tatanan sosial yang lebih besar. Diharapkan ketika seseorang bekerja pada suatu posisi tertentu, ia akan dituntut untuk terlibat dalam beberapa bentuk interaksi baik dengan objek lain atau orang lain. Serangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang karyawan di tempat kerja, biasanya melibatkan lebih dari satu peran..

Biddle dan Thomas (1966) menggolongkan dalam tiga indikator berkenaan perilaku pada korelasinya dengan peran yakni:

- a. Harapan tentang peran (expectation). Individu dalam peran tertentu diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu, dan harapan tersebut dipegang oleh orang lain. Harapan perilaku dapat dipegang oleh masyarakat yang lebih besar, oleh kelompok yang lebih kecil, atau oleh individu.
- b. Norma (norm) Seperti yang ditunjukkan oleh Secord dan Backman, optimisme konvensional hanyalah satu dari banyaknya pilihan yang ada. Berbagai bentuk antisipasi tersebut diklasifikasikan oleh Secord dan Backman sebagai berikut:
 - 1) Harapan yang sifat meramalkan (anticipatory), yakni harapan berkenaan sebuah perilaku yang nantinya terjadi.
 - 2) Harapan normatif (role expectation), yakni keharusan yang menyertakan sebuah peranan.
- c. Bentuk perilaku khusus peran (kinerja). Tindakan aktor mewujudkan peran mereka. Penampilan aktor dalam peran ini mengambil berbagai gaya, tetapi semuanya asli. Tidak ada batasan yang ditempatkan pada keragaman teori peran semacam ini. Alih-alih mengkategorikan istilah menurut apa yang mereka gambarkan dalam hal perilaku, teori peran cenderung mengklasifikasikan istilah menurut dari mana mereka berasal serta untuk apa mereka digunakan (motivasi). Dengan cara ini, kita dapat mengkategorikan perilaku peran menurut hasilnya, seperti keberhasilan di tempat kerja atau di sekolah atau olahraga atau dalam mendisiplinkan anak-anak atau menyediakan bagi mereka atau menjaga perdamaian atau memelihara ketertiban.
4. Kompleks Industri-Militer Dwight Eisenhower, mantan pemimpin dan presiden militer AS, menciptakan istilah "kompleks industri militer" (MIC) pada tahun 1961 untuk menggambarkan jaringan organisasi yang saling berhubungan dalam pembentukan militer dan keamanan AS, termasuk pemerintah federal, perusahaan swasta, lembaga keuangan, industri pertahanan, akademisi, dan pensiunan dan skeptis. strategis, terikat bersama dalam sistem tanggung jawab yang ditugaskan.

Pertumbuhan industri pertahanan suatu negara penting bagi keamanan negara, selain itu juga berpotensi untuk mendongkrak perekonomian. Misi MIC adalah untuk Menumbuhkan Industri yang bisa mengarah dalam;

- a. Penguasaan pada teknologi militer yang berbasis informasi serta teknologi;
- b. Kesiapan menggerakkan potensi militer yang dimiliki dalam alat pamaksa ;
- c. Ketahanan ekonomi teknologi serta perangkat persenjataan pengaruhi orientasi pertahanan serta keamanan Negara,
- d. Membangun kader bela negara terkhusus dalam pertahanan serta keamanan yang memfokuskan pengadaan perangkat perang.

Sektor pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk agenda nasional dan internasional. Selanjutnya, anggaran yang cukup besar tersebut akan dialihkan dari program-program sosial untuk mendukung penambahan persenjataan dan pembangunan kekuatan, sehingga menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan semakin memberikan pengaruh besar bagi industri militer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

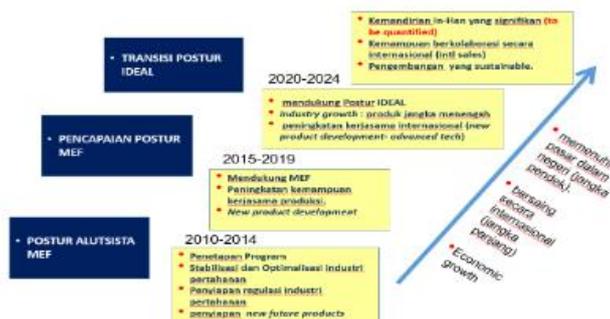
Hasil Penelitian

Indonesia ialah negara kepulauan, permasalahan kedaulatan serta keamanan negara jauh lebih bernuansa di sana. Tidak cukup hanya mempertahankan, memperjuangkan, dan memupuk kekuatan dan gengsi bangsa di dalam batas-batasnya sendiri. Karena ketergantungannya saat ini dan di masa depan pada perairan internasional untuk perdagangan, Indonesia perlu memperluas lingkup ekonominya untuk mencakup jarak hingga 200 mil laut dari batas teritorialnya.

Pembangunan industri menawarkan segala tujuan pemerataan pembangunan industri ke wilayah Indonesia dalam rangka memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional. Perencanaan diperlukan di daerah lain karena pembangunan di pulau Jawa masih terjadi di beberapa bagian saat ini. Bela negara menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan. Republik Indonesia sebagai negara berdaulat yang luasnya lebih dari 1.906.240 kilometer persegi, membutuhkan struktur militer yang unik untuk melindungi wilayahnya yang luas. Membeli alutsista asing tidak akan membuat Anda belajar tentang kekhasan perangkat keras pertahanan asing yang bertentangan dengan budaya negara kita sendiri.

Hasilnya adalah peningkatan kemungkinan konflik batas laut dan bentuk wilayah lainnya. Memiliki perangkat keras pertahanan mutakhir yang disesuaikan dengan kebutuhan negara mengurangi masalah keamanan. Oleh karena itu penting untuk berinvestasi dalam pemeliharaan, alih teknologi, integrasi, dan yang terpenting, penguasaan alutsista yang digunakan baik untuk keperluan teknis maupun non-teknis jika kita ingin melihat industri pertahanan berkembang. Dengan cara ini, Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya pada negara lain untuk memasok perangkat keras militer (Adang & Arwin, 2010). Untuk mencegah dan menjamin kepemilikan tersebut secara efektif, pertahanan negara harus mampu mengambil peran utama. kekuatan pertahanan harus dievaluasi dengan melihat kekokohan kekuatan pertahanan negara. Penting untuk mengambil langkah-langkah kuantitatif, tetapi mereka harus akurat, terutama jika itu statis, seperti rasio pasukan dengan warga sipil atau jumlah pesawat dengan mil persegi, yang tidak menceritakan keseluruhan cerita tetapi menjadi indikator pertempuran. Sekalipun rasio force-to-area memang jauh lebih kompleks di Indonesia daripada di negara-negara kontinental/daratan, klaim bahwa militer Indonesia cukup oleh Global Fire Power, antara lain, sebagaimana dikutip di atas, mungkin benar pada tingkat komparatif tetapi tidak mengilustrasikan kebutuhan Indonesia sebagai negara.

Pemerintah memprioritaskan pertumbuhan sektor pertahanan untuk memperkuat deterrence (pencegahan) dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Oleh karena itu, masterplan industri pertahanan harus disusun dalam upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan.



Gambar 2. Master Plan Pertahanan

Untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kerja sama internasional, seperti yang digambarkan dalam gambar, seseorang perlu mengambil inisiatif untuk menjalin aliansi dengan berbagai organisasi. Republik Indonesia memiliki banyak sinergi, salah satunya adalah dengan terciptanya sistem kebijakan pita pengaman nasional yang menyambungkan pulau-pulau besar menjadi satu. Sabuk keamanan nasional adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya hal-hal di atas dalam bidang politik, pertahanan, dan ekonomi. Dari Sabang sampai Merauke, potensi ekonomi, sosial, politik, budaya, demografi, dan sumber daya alam Indonesia harus diintegrasikan ke dalam peta kekuatan pertahanan.

Prasarana yang fungsional dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh wilayah perbatasan dan pesisir, seperti produk perahu yang dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan, dapat menjadi bagian dari pergerakan ekonomi di wilayah tersebut jika industri pertahanan berkembang. Mengingat Pulau Sebatik hanya berjarak setengah jam dari Tawau, Malaysia, maka wajar jika para nelayan di pulau itu mengeringkan ikan yang mereka tangkap dan mengirimkan hasil keringnya ke sana.

Butuh waktu 3,5 jam jika ikan dijual ke Nunukan. Makanya harganya naik. Fakta bahwa orang Tawau Malaysia menyediakan dana untuk para nelayan adalah keuntungan tambahan. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan perlu merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sangat penting untuk memiliki akses yang mudah ke pedalaman. Sangat penting untuk memasukkan budaya Indonesia ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa publik kemungkinan akan merangkul dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan yang disederhanakan. Langkah selanjutnya adalah membangun sistem koordinasi lintas lembaga yang memaksimalkan peran dan sinergi kelembagaan atau pengembangan kelembagaan yang efektif. Bantuan Pemerintah untuk efisiensi pertahanan negara melalui implementasi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara". Secara formal, kebijakan ini disebut "mobilisasi", dan itu berarti menyatukan dan mempekerjakan semua angkatan bersenjata negara, serta semua sarana dan prasarana negara, dengan tujuan mengalahkan setiap dan semua bahaya eksternal dan internal. bangsa yang mengancam stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rakyatnya. Padahal undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan tidak menyebutkan industri pertahanan, disisi lain pengembangan sumber daya manusia dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan industri pertahanan.

Proses pengelolaan laut termasuk tetap mengikuti perkembangan isu-isu kelautan yang muncul. Ada berbagai divisi yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai masalah terkait maritim. Hal ini menyebabkan masalah pada proses koordinasi yang tidak sinkron dan seringkali menimbulkan konflik ego antar industri yang berbeda. Industri pertahanan regional dikembangkan karena tiga alasan utama: (1) untuk membina kerjasama di bidang pertahanan melalui kemitraan bersama, usaha patungan, dan produksi bersama; (2) memperkenalkan produk pertahanan tidak sebatas dalam pertahanan tetapi dalam membantu pula mendukung masyarakat perbatasan serta pesisir; dan (3) membantu negara dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta mensosialisasikan pentingnya keamanan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, tekad industri pertahanan di wilayah pesisir dan perbatasan mengungkapkan bahwasanya pembangunan pertahanan ditujukan untuk seluruh wilayah seta bisa dipergunakan oleh banyak kelompok dengan bersama-sama untuk memajukan perangkat keras militer yang canggih.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya dan peluang yang unik, sehingga sangat penting untuk memetakan negara secara akurat. Perkembangan industri yang mapan di

setiap daerah juga harus diperhatikan dalam rantai pasok. Jika perusahaan pertahanan memerlukan nikel, misalnya, bisa mengarah untuk memasok bahan baku dari daerah Morowali daripada mengimpornya. Produsen timah dan aluminium, misalnya, bisa ditemukan di wilayah Bangka selain Morowali. Ini memiliki banyak aplikasi di industri kedirgantaraan. Sumber daya manusia dan teknologi harus prima dan siap menerima dan mengolah bahan baku untuk produksi dalam negeri.

Selain reputasinya sebagai pedagang minyak utama, Indonesia juga merupakan produsen utama minyak sawit. Melihat potensi tersebut, sektor pertahanan harus memanfaatkannya sebagai sumber bahan bakar untuk kendaraan berat serta jenis peralatan militer lainnya. Masalah negara tidak dapat diselesaikan tanpa manajemen yang baik, sehingga sangat penting untuk menyusun rencana untuk membangun institusi yang efisien untuk menangannya. Dalam konteks ini, manajemen adalah kelompok atau individu yang paling mampu fokus pada isu-isu pembinaan sumber daya manusia, pembinaan pendanaannya, pembinaan materialnya, koordinasinya, metodologi dan semisalnya.

KESIMPULAN

Dari jabaran serta penjelasan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan yakni: Indonesia memerlukan strategi komprehensif untuk mengembangkan sektor pertahanan industrinya sehingga angkatan bersenjata dapat secara efektif menggunakan kemampuan produk industri untuk melawan ancaman internal dan eksternal. Dalam rangka mengembangkan sektor pertahanan yang khas Indonesia dan mencerminkan karakter negara, industri pertahanan dalam negeri memerlukan peranan pihak yang terintegrasi untuk mengurangi jumlah tumpang tindih antar kementerian dan lembaga. Perencanaan penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan industri pertahanan sebagai upaya siap membantu komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman masa damai dan masa perang/krisis; meliputi peran Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, hingga tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Adang & Arwin Datumaya. (2010). *Membangun Sinergi dan Kolaborasi Tiga pilar Nasional Menuju Kemandirian Sistem Pertahanan Keamanan Nasional*. SATRIA Studi Pertahanan Vol 6(2).
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, (1966). *Role Theory: Concept and Research*. NewYork. : Wiley
- Bryson, Jhon M. (2007). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Cet 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Digdownseiso, Kumba. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
- Mintzberg, H., & Quinn, J. (1991). *The Strategy Process: Concept, Context, and Cases*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Puspitawati, Dhiana. (2014). *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara*. ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 2, pp 151-302
- Stanger, Allison & Mark Eric Williams. *Private Military Corporations: Benefits and Costs of Outsourcing Security*
- Teuku Rezasyah. (2012). *Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Dari Prespektif Ideal Hingga Praktis yang diakses dari pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/200905/politik_luar_negeri_republik_indonesia.pdf*. hal. 2. Pada tanggal 18 April 2021.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk

Pertahanan Negara

Wahyudi, yuda & Mahifal. (2013). Strategi Pembangunan Negara . WAWASAN TRIDHARMA: Scientific Magazine of Kopertis Wilayah IV No.6No.2009/SK/DITJEN PPG/STT/ 1994; ISSN 021 5-8256

Yusgiantoro, Purnomo. (2014). Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama